

Judul : Perlindungan saksi korban, Komisi XIII: kinerja LPSK belum optimal
Tanggal : Sabtu, 31 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Perlindungan Saksi Korban Komisi XIII: Kinerja LPSK Belum Optimal

FOTO TEDY RIA



Mafirion

ANGGOTA Komisi XIII DPR Mafirion menilai, kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih lemah dalam memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat. Kehadiran negara melalui LPSK belum sepenuhnya dirasakan oleh saksi dan korban tindak pidana.

Mafirion bilang, ada sejumlah persoalan mendasar yang menghambat optimalisasi peran LPSK. Pertama, belum optimalnya pelaksanaan fungsi LPSK. Kedua, rendahnya respons terhadap peristiwa yang terjadi. Ketiga, ketidaktahuan publik tentang LPSK. Terakhir, keterbatasan anggaran disertai penyusunan postur anggaran yang mengecewakan.

"Tugas utama LPSK adalah perlindungan nyata bagi korban, bukan cuma aktivitas administratif atau kajian," tegas Mafirion saat RDP Komisi XIII dengan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/01/2026).

Dia lalu memberi contoh beberapa kasus yang menyita perhatian publik namun dinilai belum menunjukkan kehadiran aktif LPSK di lapangan. Salah satunya, kasus Nenek Saudah di Pasaman, Sumatera Barat. Jika memang memberi perlindungan, LPSK harusnya datang dan memberi keterangan, itu justru tidak dilakukan.

Dalam kasus besar yang menjadi perhatian nasional, lanjutnya, seharusnya kehadiran LPSK dapat terlihat jelas, baik melalui tindakan langsung maupun komunikasi kepada publik. Karena perlindungan yang ada saat ini masih terbatas pada proses hukum dan belum menyentuh pemulihan korban secara menyeluruh.

Kendati demikian, Mafirion menegaskan tetap mendukung penguatan LPSK, termasuk dari sisi anggaran. Namun dukungan itu harus diiringi dengan pembenahan kinerja dan pembuktian nyata bahwa LPSK benar-benar dibutuhkan masyarakat. "Kalau mau anggarannya besar, tunjukkan kepada masyarakat dan kepada Pemerintah negara bahwa lembaga ini memang penting," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menambahkan, seharusnya kehadiran LPSK bisa dirasakan masyarakat melalui respons cepat dan kerja nyata di lapangan. Karena jika ada usulan penambahan anggaran, tentu harus punya dasar, dan itu adalah kinerja tahun sebelumnya.

Ruang kerja LPSK, lanjutnya, kini semakin luas seiring perubahan regulasi yang berlaku. Karena itu, perlu perubahan paradigma dalam penyusunan perencanaan kerja ke depan, sehingga LPSK bisa sejalan dengan perluasan tugas dan tanggung jawab lembaga.

Selanjutnya, perubahan paradigma itu juga menyangkut cara kerja LPSK agar tidak lagi berbelit-belit secara birokratis, melainkan lebih cepat dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. "Sikap dan mental kerja aparat yang bertugas harus lebih voluntaristik dibanding birokratis," katanya. ■ PYB